BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan kemiskinan (*poverty*) menjadi salah satu target kebijakan pembangunan disetiap Negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi (*multidimension*) karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga nilai dan politik (Arsyad, 2015). Artinya kemiskinan merupakan masalah yang melibatkan banyak aspek bagi kehidupan masyarakat suatu Negara, kemiskinan juga dapat menjadi gambaran buruknya perekonomian suatu Negara atau semakin tinggi kemiskinan maka indentitas Negara dipandang oleh Negara lain juga tidak baik. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk.

Kemiskinan tidak lagi hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Arsyad, 2015). Artinya

seseorang yang kekurangan akan hak-hak dasar dapat disebut sebagai masyarakat miskin, hal ini dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circke of poverty*) dari Nurkse (Nurkse, 2009). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan sumber daya manusia (SDM) yang tercermin oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah yang tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran. Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Kuncoro, 2018)

Dalam penelitian ini tingkat kemiskinan berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka dapat diasumsikan bahwa secara makro tingkat kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Demikian sebaliknya yaitu apabila tingkat pertumbuhan ekonomi turun maka diasumsikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga rendah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Boediono, 2004)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan cukup baik dan hanya turun tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Secara rinci data pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2016	3,55
2017	6,80
2018	5,36
2019	6,89
2020	-1,09
2021	3,98
2022	5,34

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara (*Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara*, 2023)

Data tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

Tabel 2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara

TAHUN	TINGKAT KEMISKINAN (%)
2016	6,99
2017	6,96
2018	6,86
2019	6,49
2020	7,41
2021	6,83
2022	6,86

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara (*Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara*, 2023)

Tingkat kemiskinan berhubungan erat bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka untuk membeli kebutuhan sehari-hari juga akan susah. Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Utara yang naik menjadikan gambaran tingkat kesejahteraan (Kuncoro, 2018)

Dasar pertimbangan peneliti mengambil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang menurun merupakan gambaran tingkat kemiskinan masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan berhubungan dengan tingkat kemiskinan, apabila tingkat kesejahteraan masyarakat rendah maka tingkat kemiskinan juga tinggi dan apabila tingkat kesejahteraan tinggi maka tingkat kemiskinan akan rendah.
2. Penggunaan variabel inflasi dikarenakan inflasi merupakan kenaikan harga barang umum secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama, kenaikan harga barang apabila dibiarkan secara terus menerus akan mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat dikarenakan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut atau pendapatan yang rendah.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara mengalami

kenaikan setiap tahunnya akan tetapi tingkat kemiskinan mengalami penurunan dengan angka yang relatif kecil, sedangkan laju inflasi masih termasuk kategori inflasi ringan

Sehingga dari gambaran yang telah dijelaskan peneliti mencoba melakukan penelitian tentang "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Utara".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh perubahan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara ?
2. Apakah inflasi memberikan pengaruh perubahan dalam meningkatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan pengaruh perubahan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara
2. Mengetahui bahwa inflasi dapat memberikan pengaruh perubahan dalam meningkatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah

1. Informasi bagi pemerintah provinsi Kalimantan Utara tentang sejauhmana tingkat signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemisikinan.
2. Bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk meneliti mengenai pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya (Arsyad, 2015)

Kemiskinan *multi dimensional*, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari

kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Arsyad, 1999).

Definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain (Arsyad, 1999)

Ukuran kemiskinan menurut (Nurkse, 2009) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

1. Kemiskinan Absolut
   Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif
   Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development* (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu (*Poverty in nations welfare*, 2023) :

1. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan.
2. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (leisure), dan rekreasi serta ketenangan hidup.
3. Kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh *International Labor Organization* (*ILO: Perbudakan Modern Meningkat Karena Kemiskinan Capai 50 Juta Orang*, 2022) sebagai berikut:

Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur: pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural (Arsyad, 2015)

2.1.1 Indikator Kemiskinan

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas

nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun pada umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah (Kuncoro, 2018)

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup (*Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara*, 2022)

Badan Pusat Statistik (*Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara*, 2022), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks

tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang per hari.

Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (*consumption based poverty line*). Oleh sebab itu, menurut (Kuncoro, 2018) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Garis kemiskinan dibedakan menurut tempat dan waktu, jadi setiap daerah baik di desa maupun di kota mamiliki nilai yang berbeda-beda dan biasanya nilai ini bertambah pada norma tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan. Batas garis kemiskinan dibedakan antara desa dan kota. Perbedaan ini sangat signifikan antara di desa dan di kota, hal ini disebabkan pada perbedaan dan kompleksitas di desa dan di kota.

Badan Pusat Statistik (*Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara*, 2023) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan

dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang per hari.

2.1.2 Penyebab Kemiskinan

Sharp (Jonnadi, Amar and Aimon, 2012) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi :

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya

pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

2.1.3 Teori Lingkaran Kemiskinan

Ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik invetasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (Nurkse, 2009), yang mengatakan " *a poor country is a poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 2.1
Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier

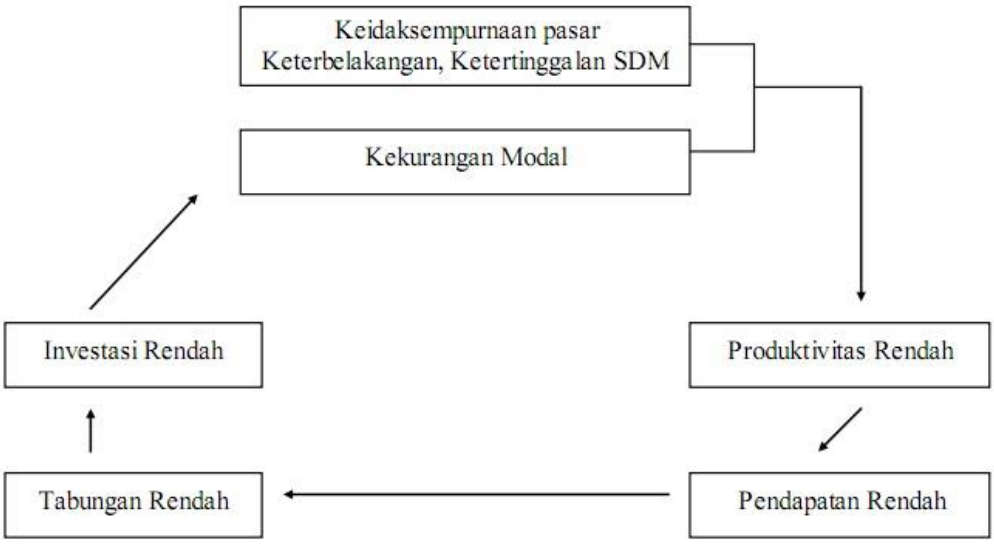

Sumber: Mudrajat Kuncoro, 1997

Ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi permintaan (*demand*), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah (Nurkse, 2009).

Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa

lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya (Sari, 2018)

Gambar 2.2
Lingkaran Kemiskinan yang Tidak Berujung Pangkal dari Nurkse

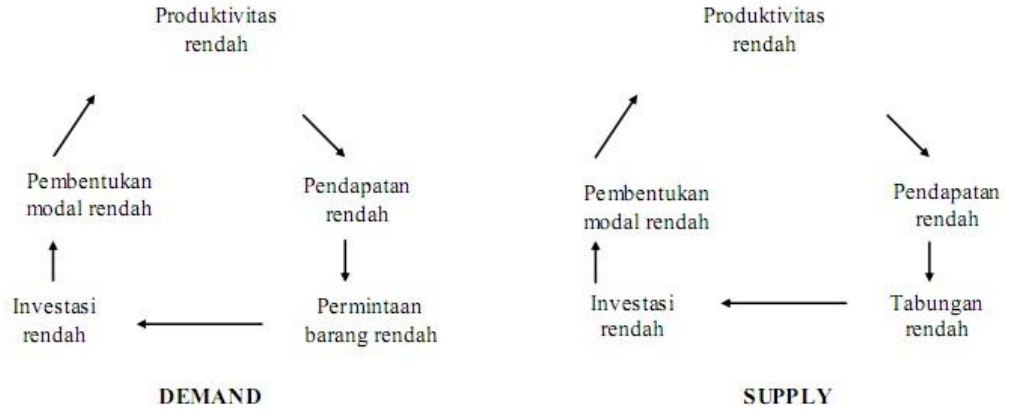

Sumber: Suryana, 2000

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah

> ”Suatu proses perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan dalam tabungan, produksi dan modal untuk meningkatkan output tanpa melihat apakah kenaikan output tersebut secara lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisa tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara” (Kuncoro, 2018)

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan perkataan lain, bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP) atau

pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai

> ”Suatu proses perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan dalam tabungan, produksi dan modal untuk meningkatkan output tanpa melihat apakah kenaikan output tersebut secara lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisa tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara (Djojohadikusumo, 1994)

Kuznets (Kuznetsov, 2006)mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai:

> Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan Jhon Stuart Mill. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, faktor luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka mengasumsikan bahwa luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori ini yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk yang disebut dengan teori pertumbuhan optimal.

Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal.

Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi (Ramdani, 2015).

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan NeoKlasik dikembangkan oleh Solow (1970) dan Swan (1956). Model Solow–Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi.

Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya subsitusi antara Kapital (K) dan tenaga Kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan subsitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal output dan rasio modal tenaga kerja.

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal, mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak

mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas capital meningkat.

Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu. Teori Neo-Klasik sebagai penerus dari teori Klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus, barang, modal, tenaga kerja, dan perlunya penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Hal khusus yang perlu dicatat adalah bahwa model NeoKlasik mengasumsikan I = S. Hal ini berarti kebiasaan masyarakat yang suka memegang uang tunai dalam jumlah besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Pertumbuhan Modern

Teori-teori selanjutnya adalah teori pengembangan model Solow, di antaranya teori pertumbuhan endogen yang berusaha menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan

mengembangkan inovasi, sehingga meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Adanya penemuan-penemuan baru berawal dari proses *learning by doing*, yang dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi ini dapat meningkatkan produktivitas, sehingga dalam hal ini kualitas sumber daya manusia adalah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Harrod (1948) di Inggris dan Domar (1957) di Amerika Serikat.

Diantara mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod Domar didasarkan pada asumsi :

1. Perekonomian bersifat tertutup
2. Hasrat menabung (MPS = 0.5) adalah konstan
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap *(constant return to scale*)
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (steady growth) dalam jangka panjang. Asumsi

yang dimaksud disini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*capital output ratio* / COR) tetap. Perekonomian terdiri dari dua sektor (Y = C + I). Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

G = K = N

Dimana :

G = Growth (tingkat pertumbuhan output)

K = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

N = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi permintaan barang (Todaro dan Smith 2004:116).

5. Teori Schumpeter

Teori tahap ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (entrepreneurship) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil resiko membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru maupun perluasan usaha, tersedia

lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut maka para pengusaha akan meminjam modal dan megadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah.

Maka menurut Schumpeter penanaman modal atau investasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni penanaman modal otonomi (autonomous investment) yakni penanaman modal untuk melakukan inovasi dan jenis investasi kedua yaitu penanaman modal yang timbul sebagai akibat kegiatan ekonomi setelah munculnya inovasi tersebut.

Selanjutnya Schumpeter mengatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa tercukupi kebutuhannya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (stationery state). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Shcumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah (Jhingan, 2022).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang yang merupakan fenomena penting yang dialami dunia dalam dua abad belakangan. Menurut (Sukirno, 2017), pertumbuhan ekonomi menimbulkan dua efek penting yaitu, pertama : kemakmuran atau taraf hidup meningkat, kedua, menciptakan kesempatan kerja baru kepada penduduk yang semakin banyak jumlahnya.

Dalam menggunakan istilah banyak yang mencampur adukkan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. (Sukirno, 2017) mendefinisikan antara pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian secara fisikal, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah , pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Pembangunan ekonomi (*economical development is growth plus change*), yaitu pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi, seperti usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pendapatan.

Menurut (Mankiw, 2020) menyatakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian.

Menurut (Mankiw, 2020), ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan *output* ekonomi jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (*output* per kapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara, atau dengan kata lain bersifat *self generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya. Menurut (Boediono, 2004), Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dalam suatu perkembangan perekonomian.

Menurut (Mankiw, 2020)juga menyatakan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi, dan kemajuan teknologi.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi suatu masyarakat tersebut lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapai pada masa sebelumnya. Sukirno (2001: 87) lebih dalam mengatakan bahwa perkembangan ekonomi baru dapat tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Ada beberapa ahli ekonomi mengemukakan teori-teori pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan teori - teori pertumbuhan ekonomi yang dan tenaga kerja dan kapital (investasi). Diantaranya adalah R.F. Harrod dan Evsey Domar yang mengembangkan teori Harrod Domar (Model Neo Klasik). Menurut Keduanya pengeluaran investasi (i) tidak hanya mempengaruhi (lewat proses *multiplier*) terhadap agregat permintaan (Z), tetapi juga terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Jadi I =ΔK, dimana K adalah stok kapital dalam masyarakat. Setiap penambahan K meningkat pula kemampuan masyarakat untuk mengahasilkan *output* (Q^p). Q^p adalah *output* yang potensial bisa dihasilkan dengan *stock capital* (atau kapasitas produksi) yang ada. Kemudian Robert Solow dan Trevor Swan mengemukakan teorinya, yaitu: teori Sollow-Swan yang mengemukakan teorinya, yaitu: teori Solow-Swan yang mirip dengan teori Harrod-Domar tetapi lebih luwes. Dalam model ini dipergunakan suatu fungsi (Q) yang lebih umum, sehingga dapat menampung berbagai kemungkinan substitusi antara kapital (C) dan tenaga kerja (L), yaitu : Q = f(C,L) dimana tingkat *output* (pertumbuhan) didapat dengan berbagai kemungkinan kombinasi penggunaan *capital* dan *labor* (Boediono.2002:172). Teori

pertumbuhan Neo-Klasik mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi yang dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas, yaitu fungsi produksi.

Cobb-Douglas dalam (Sukirno, 2001 : 85). Dalam setiap kebijakan ekonomi makro maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting yang harus dicapai dalam suatu perekonomian, pertumbuhan suatu perekonomian yang baik yaitu suatu perekonomian yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

(Todaro, 2001 : 66) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktur dan sektoral yang tinggi. Akan tetapi perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah tidak saja ditinjau dari sisi internal tenaga kerja dan kapital (investasi) saja, tetapi perlu juga dari sisi eksternal seperti daya saing dan kinerja perkembangan sektor yang dibandingkan dengan kinerja perkembangan sektor luar. Dari sisi eksternal dapat ditinjau pertumbuhan dan keterkaitan ekonomi yang menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya.

2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Penelitian ini didasarkan pada teori pendapatan 3 sektor yaitu Y = C+I+G, dimana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah Investasi dan G adalah pengeluaran pemerintah. Artinya semakin besar tingkat pendapatan nasional maka berhubungan dengan tingkat konsumsi masyarakat, investasi serta pengeluaran pemerintah. Pendapatan nasional tentu berhubungan dengan gross domestic bruto (GDP) dalam tingkatan nasional. Sedangkan dalam tingkat daerah

maka berhubungan dengan PDRB. Dalam penelitian ini laju pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas harga konstan. Tingkat konsumsi berhubungan erat dengan daya beli masyarakat, daya beli masyarakat berhubungna erat dengan tingkat pendapatan. Asumsinya apabila tingkat konsumsi rendah maka diasumsikan tingkat pendapatan masyarakat juga rendah dan tentunya kemiskinan akan tinggi.

2.5 Inflasi

2.5.1 Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia. Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, inflasi memiliki pengaruh penting dalam mengukur kemajuan bidang ekonomi suatu wilayah.

Inflasi erat kaitannya dengan fenomena interaksi antar *demand* dan *supply*, namun kenyataannya tidak lepas dari faktor-faktor lain seperti kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa, perilaku konsumen dan adanya kebijakan pemerintah.

Sebelum membahasnya lebih lanjut, terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian singkat dari inflasi. Boediono (2008 : 55) mendefisikan inflasi sebagai berikut :

> “ Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus.”

Boediono menjelaskan kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas pada sebagian besar dari harga-

harga barang lain. Selian itu, kata “kecenderungan menaik yang terus menerus” juga perlu digaris-bawahi.

Hal yang sama juga ditekankan oleh Nopirin, Ph.D (2000 : 25) bahwa yang terpenting dalam inflasi adalah kenaikan harga umum barang berlangsung secara terus menerus.

Selanjutnya Tajul Khalwaty (2000 : 6) juga mengemukakan definisi inflasi, yaitu sebagai berikut :

“ Inflasi merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (interinsik) mata uang suatu negara”. Terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga tersebut, nilai uang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga tersebut”

Inflasi yang berlangsung lama akan melumpuhkan perekonomian, di mana pertumbuhan ekonomi berada dalam kondisi *stagnan*. Jika stagnasi terjadi di negara-negara industri, maka pengaruhnya akan terasa pula di negara-negara berkembang, terutama yang menggantungkan komoditas ekspor andalannya ke negara maju. Dengan demikian akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan negara-negara berkembang, bahkan dapat meluas terhadap stabilitas perekonomian global.

2.5.2 Penggolongan Inflasi

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi, dan penggolongan mana yang kita pilih, tergantung pada tujuan kita.

Penggolongan pertama didasarkan pada “parah” tidaknya inflasi tersebut. Jadi inflasi tersebut dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Inflasi ringan (di bawah 10%)
b. Inflasi sedang (antara 10 – 30%)
c. Inflasi berat (antara 30 – 100%)
d. Hiperinflasi (di atas 100%)

Penggolongan yang kedua adalah berdasarkan sebabnya. Atas dasar, inflasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Demand inflation, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
b. Cost inflation, yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi.
c. Stuctural inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat dari adanya berbagai kkendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran di dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

Penggolongan inflasi yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi. Jadi inflasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

   Inflasi ini timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panenan yang gagal, dan sebagainya.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

   Inflasi ini timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara langganan berdagang negara kita.

2.5.3 Perhitungan Inflasi

Inflasi pada dasarnya adalah tingkat perubahan harga-harga, sedangkan tingkat inflasi adalah akumulasi dari inflasi-inflasi terdahulu atau persentase perubahan di dalam tingkat harga. Tingkat inflasi dapat dijelaskan dengan formula berikut :

$$\pi = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

dimana π adalah tingkat inflasi, P_1 adalah harga pada tahun t (tahun sekarang), P_{t-1} adalah tingkat harga pada tahun t-1 (tahun sebelumnya). Tingkat harga sekarang (P_t) dapat ditulis sebagai berikut :

$$P_t = P_{t-1} + \pi(P_{t-1})$$

2.5.4 Sebab-sebab timbulnya Inflasi

(a). Pandangan Kaum Klasik dan Moneteris

Teori inflasi dari kaum klasik dapat dianalisis dalam kerangka teori kuantitas uang dengan menggunakan persamaan pertukaran (*equation of exchange*), MV = PY. Persamaan pertukaran tersebut dapat ditulis kembali dimana masing-masing peubah dalam persamaan tersebut dinyatakan sebagai persentase perubah sepanjang waktu sebagai berikut :

$$\frac{\Delta M_s}{M_s} + \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta Y}{Y}$$

Dengan menempatkan tingkat inflasi di sebelah kiri, maka persamaan di atas dapat ditulis kembali manjadi :

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta M_s}{M_s} - \frac{\Delta Y}{Y} + \frac{\Delta V}{V}$$

dimana ΔP/P adalah tingkat inflasi, ΔMs/Ms adalah pertumbuhan jumlah uang beredar, ΔV/V adalah persentase perubahan di dalam kecepatan perputaran uang, dan ΔY/Y adalah laju pertumbuhan output. Dari persamaan tersebut, inflasi disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar, pertumbuhan output, dan perubahan dalam kecepatan perputaran uang. Karena kaum klasik

mengasumsikan kecepatan perputaran uang (V) itu adalah konstan, yang berarti $\Delta P/P = 0$, maka persamaan tersebut akan menjadi sebagai berikut :

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta M_s}{M_s} - \frac{\Delta Y}{Y}$$

Persamaan di atas menyatakan bahwa tingkat inflasi adalah sama dengan pertumbuhan jumlah uang beredar dikurangi pertumbuhan output. Kaum klasik mengasumsikan bahwa perekonomian berada dalam tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*), yang berarti peubah Y dalam persamaan pertukaran adalah tetap. Selain itu, kaum klasik juga mengasumsikan peubah V adalah tetap. Dengan asumsi V dan Y adlah tetap, maka kaum klasik lebih jauh mengatakan bahwa kenaikan di dalam jumlah uang beredar (Ms) akan menyebabkan perubahan yang proposional dalam peubah tingkat harga (P). Dengan demikian penyebab utama timbulnya inflasi atau kenaikan harga menurut kaum klasik adalah karena kenaikan atau pertumbuhan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, inflasi menurut mereka menurut gejala atau fenomena moneter.

Hal yang senada juga dikemukakan kaum moneteris yang mengklaim inflasi itu sebagai fenomena moneter dan bahwa peubah kecepatan perputaran uang (V) itu adalah stabil atau konstan. Tetapi kaum moneteris berbeda dengan kaum klasik dimana mereka mengatakan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar (Ms) tersebut juga berpengaruh pada output dan kesempatan kerja. Jadi tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat harga (P) sebagai mana dikemukakan oleh kaum klasik.

(b). Pandangan Keynes

Di dalam model Keynesian, jumlah uang beredar (Ms) hanaylah salah satu faktor penentu tingkat harga. Namun dalam jangka pendek., ada banyak faktor lain menurut Keynes yang mempengaruhi tingkat harga, seperti pengeluaran konsumsi (C), pengeluaran investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan pajak (T). Analisis Keynes menunjukan bahwa kenaikan jumlah uang beredar yang pesat akan menyebabkan tingkat harga mengalami kenaikan secara terus menerus dengan laju yang tinggi, yang berarti menciptakan inflasi.

(c). Pandangan Aliran Ekspektasi Rasional dan Ekonomi Sisi Penawaran

Para teoritis aliran ekspektasi rasional juga memandang inflasi sebagai fenomena moneter. Namun mereka juga percaya bahwa perubahan yang bersifat antisipatif da dalam jumlah uang beredar (*money supply*) hanya akan membawa dampak terhadap tingkat harga (P), dan tidak mempunyai pengaruh terhadap output (Y) dan kesempatan kerja. Pandangan kaum Ratex tentang inflasi nampaknya lebih dekat dengan pandangan kaum klasik daripada pandangan kaum moneteris dan Keynesians. Karena teoritisi Ratex percaya bahwa inflasi merupakan fenomena moneter, maka mereka juga mengatakan bahwa jumlah uang beredar merupakan kunci untuk mencapai stabilitas harga.

Para ekonom dari kelompok ekonomi sisi penawaran, juga memandang inflasi sebagai fenomena moneter. Konsekuensinya, mereka mengusulkan pembatasan moneter (*monetary restraint*) untuk pengurangan inflasi. Pada saat yang sama, mreka juga menganjurkan pengurangan atau penurunan tarif pajak sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan penawaran agregat. Dengan meningkatkan laju pertumbuhan penawaran agregat, mereka

percaya bahwa tingkat inflasi dapat dikurangi. Tentu saja kebijakan sisi penawaran itu sendiri tidak akan dapat mengurangi tingkat inflasi secara bermakna, tanpa diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain, seperti kebijakan sisi permintaan.

(d). Pandangan Kaum Strukturalis

Analisis mereka tentang inflasi lebih difokuskan pada persoalan inflasi yang terjadi di negara-negara sedang berkembang pada umumnya dan terutama negara-negara Amerika Latin. Inflasi menurut mereka merupakan sesuatu yang melekat di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Kaum strukturalis mengindikasikan ada beberapa kendala yang menjadi penyebab kenaikan harga atau inflasi di negara-negara berkembang, yaitu :

1. Kendala penawaran bahan pangan yang bersifat inelastis. Hal ini disebabkan karena adanya kendala struktural di dalam sektor pertanian negara-negara sedang berkembang, dimana dominasi berada di tangan *latifundia* (usaha pertanian raksasa) non kapitalis yang terdorong untuk memaksimumkan laba, atau di tangan *minifundia* (usaha pertanian gurem) yang beroperasi hampir-hampir hanya di tingkat subsistensi dan hampir tidak terkait ke dalam perekonomian pasar.
2. Kendala Devisa (*foreign exchange constraint*). Kendala ini timbul karena nilai pertumbuhan penerimaan devisa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan akan barang impor yang meningkat berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan yang semakin cepat, pertumbuhan penduduk dan upya industrialisasi yang pesat yang berlangsung dalam suaatu lingkungan dengan teknologi masih terbatas, ketidak-seimbangan struktural (*struktural imbalances*) dan mobilitas faktor yang tidak sempurna (*imperfect factor mobility*). Kekurangan barang impor dan meningkatnya harga barang impor merangkap kenaikan harga komulatif; kesulitan neraca pembayaran pada akhirnya memaksa berbagai negara untuk mendevaluasi mata uangnya dan ini selanjutnya menambah beratnya tekanan inflasi dalam negeri, terutama bila elastisitas harga permintaan akan barang impor sangat rendah.
3. Kendala fiskal (*fiscal constraint*) yaitu kendala berupa tidak mencukupi sumber daya keuangan dalam negeri. Usaha-usaha pembangunan memperbesar cakupan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, tetapi penerimaan pemerintah jarang meningkat cukup pesat untuk

> mengimbangi kenaikan pengeluaran. Struktur pajak bersifat regresif dan birokrasi penagihan pajak seringkali sudah kuno, tidak efisien, dan korup. Ketidak efisienan penerimaan biasanya diatasi denagn cara lain berupa anggaran devisit, yang mengandung akibat menimbulkan inflasi. Defisit anggaran yang erat kaitannya denga pembangkakan kredit dalam negeri karena pengeluaran pemerintah tidak mudah dikurangi dan penerimaan tidak mudah ditingkatkan, merupakan salah satu komponen pokok mekanisme perambatan inflasi.

Bagi kaum strukturalis, kenaikan jumlah uang beredar adalah faktor permisif yang memungkinkan spiral inflasi (*inflation spiral*) membentuk diri dan menjadi kumulatif, dan gejala yang demikian merupakan gejala kekakuan struktural yang mempengaruhi tekanan-tekanan inflasi, dan bukan sebab inflasi itu sendiri.

2.5.5 Dampak Inflasi

Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat sebagai berikut :

Pertama, inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat , dan inilah yang disebut efek redistribusi dari inflasi. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akn menyebabkan pendapatan riil seseorang meningakat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh. Namun parah tidaknya dampak inflasi ini sasngat tergantung pada apakah inflasi tersebut dapat diantisipasi ataukah tidak.

Kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat mengalahkan sumber daya dari investasi yang produktif ke investasi yang tidak produktif, sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif.

Ketiga, inflasi dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja, dengan cara yang lebih langsung yaitu dengan memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan, dan juga memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.

Keempat, inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi dimasa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang ketinbang mereka menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi. Begitu pula halnya dengan bank atau lembagapeminjaman lainnya. Jika sekiranya mereka menduga bahwa tingkat inflasi akan naik dimasa mendatang, maka mereka akan mengenakan tingkat bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan atas penelitian tentang Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah yang dilakukan oleh Wisnu Adhi Saputra (2011) Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Model regresi yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda

(*Ordinary Least Squares Regression Analysis)* dengan menggunakan Panel Data dengan menggunakan pendekatan efek tetap *(Fixed Effect Model).* Penelitian ini menggunakan dummy tahun sebagai salah satu variabelnya. Penggunaan dummy tahun dalam penelitian ini adalah untuk melihat variasi tingkat kemiskinan antar waktu di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas **(**Jumlah Penduduk, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran**)** secara bersama-sama dapat menunjukkan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Dan nilai R-squared sebesar 0.609 yang berarti sebesar 60,9 persen variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 40 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (Saputra and Mudakir, 2011)

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi adalah Suatu proses perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan dalam tabungan, produksi dan modal untuk meningkatkan output tanpa

melihat apakah kenaikan output tersebut secara lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.

2. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.
3. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus.

2.6 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, dapat dibuat kerangka konsep dalam bentuk gambar sebagai berikut :

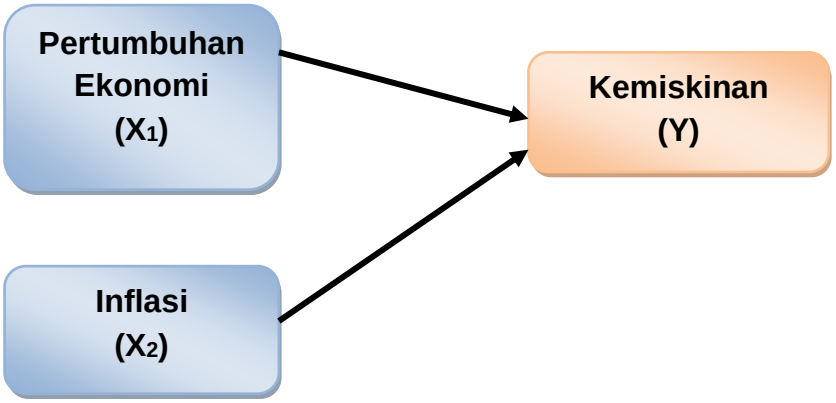

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini merupakan variabel independen (X1) dan Inflasi sebagai (X2) dan Kemiskinan merupakan variabel dependen (Y). Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dalam penelitian ini objeknya adalah provinsi Kalimantan Utara.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang umum secara teruse menerus, artinya harga barang yang dijual produsen adalah mahal. Apabila daya beli masyarakat rendah maka masyarakat tidak mampu membeli barang kebutuhan hidupnya dan tentunya daya beli masyarakat yang rendah berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diasumsikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Tingkat kesejahteraan tinggi berhubungan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggi. Sehingga dapat diartikan apabila tingkat kesejahteraan masyarakat rendah maka diartikan tingkat kemiskinan adalah tinggi.

2.4 Hipotesis

Hipotesis ini didasarkan atas teori pertumbuhan ekonomi yang merupakan suatu proses perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan dalam tabungan, produksi dan modal untuk meningkatkan *output* tanpa melihat apakah kenaikan *output* tersebut secara lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisa tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Artinya pembangunan ekonomi berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Karena penduduk yang memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat maka semakin mudah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila tingkat kesejahteraan rendah maka dapat diartikan tingkat kemiskinan juga tinggi.

Hipotesis selanjutnya berdasarkan tentang teori inflasi yang menjelaskan kenaikan harga barang-barang umum secara terus menerus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Teori selanjutnya berhubungan dengan teori perilaku produsen dalam mencari keuntungan, dimana ketika terjadi inflasi yang menyebabkan harga barang naik maka dari sisi keuntungan masyarakat akan membeli barang tersebut, karena berhubungan dengan kelangsungan hidup.

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh perubahan dalam menurunkan tingkat Kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara.
2. Inflasi memberikan pengaruh perubahan dalam meningkatkan tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Penjelasan spesifik atau khusus mengenai variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1 Pertumbuhan ekonomi adalah proses dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang terdiri dari 17 sektor diukur setiap tahunnya dari PDRB atas harga konstan di Kabupaten atau kota yang ada di provinsi Kalimantan Utara. Satuan hitung yang dipergunakan adalah persentase(%).

2 Inflasi adalah kenaikan dari harga-harga barang dan jasa secara terus menerus yang terjadi di provinsi Kalimantan Utara, inflasi di Kalimantan Utara diukur berdasarkan inflasi kota Tarakan dan Kota Tanjung Selor. Satuan hitung adalah persentase (%).

3 Tingkat Kemiskinan adalah kondisi masyarakat Kalimantan Utara yang tidak mampu kebutuhan hidupnya sehari-hari, biasanya ukuran kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara adalah pendapatan per bulan di bawah Rp.700.000. Satuan hitung yang dipergunakan adalah persentase (%).

3.2 Rincian data yang diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. PDRB atas harga konstan dari tahun 2016 sampai dengan 2022 provinsi Kalimantan Utara;
2. Inflasi tahun tahun 2016 sampai dengan 2022 provinsi Kalimantan Utara;
3. Pertumbuhan ekonomi dari tahun tahun 2016 sampai dengan 2022 provinsi Kalimantan Utara;
4. Kemiskinan dari tahun tahun 2016 sampai dengan 2022 provinsi Kalimantan Utara;
5. Data-data yang mendukung penelitian.

3.3 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara. Tahun penelitian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Sehingga total data yang digunakan adalah 7 tahun.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait, dikarenakan data tersebut sudah dipublikasikan.

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. *Study* kepustakaan yaitu memperoleh teori-teori yang berhubungan dengan Koperasi seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan lain-lain melalui buku dan website (Http : Google.com—masukkan *keyword* atau kata kunci di *searching* yang akan dicari).

2. *Study* Dokumentasi yaitu penelitian dengan memperoleh data Badan Pusat Statistik Kaltim dan Bapedda Kaltim.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Metode *Multiple Regression*

Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y_t = B_o + B_{1t}. X_t + B_{2t}. X_t + e_t$$ (Aspian Nur *et al.*, 2020)

Di mana dalam penelitian :

Y_t = Tingkat kemiskinan

B_0 = Intercept

B_1 = Slope

X_{1t} = Pertumbuhan ekonomi

X_{2t} = Inflasi

e_t = Residual

Tingkat kepercayaan (*Level of confident*)

Tingkat signifikan yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah 95 % artinya peneliti percaya terhadap model penelitian sebesar 95 %.

3.5.2 Uji t

Pengujian koefisien dilakukan secara terpisah (parsial) antara variabel X dengan Y dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95 % digunakan rumus sebagai berikut :

1. Membandingkan nilai t hitung dengan t kritisnya. Keputusan menolak atau menerima Ho sebagai berikut :

a) Jika nilai t hitung > nilai t kritis maka Ho ditolak atau menerima Ha atau Sig < 5%.
b) Jika nilai t hitung < nilai t kritis maka Ho diterima atau menolak Ha atau Sig > 5%.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum *Profile* Provinsi Kalimantan Utara

4.1.1 Geografi (*Geographic*)

Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, yang sebelumnya disahkan menjadi provinsi baru dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.

Sebagai Provinsi baru yang ke 34 di Indonesia, Provinsi Kalimanta Utara diresmikan pada tanggal 22 April 2013 seiring dengan dilantiknya Penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Dr. H. Irianto Lambrie oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No.48/P Tahun 2013 tanggal 20 April 2013.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang penetapan keanggotaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang cakupan wilayahnya terdiri dari:

- Kabupaten Bulungan;
- Kota Tarakan;
- Kabupaten Malinau;
- Kabupaten Nunukan; dan

- Kabupaten Tana Tidung.

Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2016-2021:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di Provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;

13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampaun APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.

Kondisi Wilayah

Provinsi Kalimantan Utara terletak pada posisi antara $114^{0}35'22"$ – $118^{0}03'00"$ Bujur Timur dan antara $1^{0}21'36"$ – $4^{0}24'55"$. Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas ± 75.467,70 km^2 dengan luas lautan seluas 11.579 Km^2 (13% dari luas wilayah total). Secara administratif Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Batas daerah daratan terdapat sekitar 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.

Sebelah Utara : Negara Sabah (Malaysia)

Sebelah Timur : Laut Sulawesi

Sebelah Selatan : Provinsi Kalimantan Timur

Sebelah Barat : Negara Sarawak (Malaysia)

4.2 Data Penelitian

4.2.1 Kemiskinan

Ukuran kemiskinan secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

1. **Kemiskinan Absolut**

   Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. **Kemiskinan Relatif**

   Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Data tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

Tabel 3 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara

TAHUN	TINGKAT KEMISKINAN (%)
2016	6,99
2017	6,96
2018	6,86
2019	6,49
2020	7,41
2021	6,83
2022	6,86

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016 sebesar 6,99%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 6,96%. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan turun menjadi 6,86% dan pada tahun 2019 turun lagi tingkat kemiskinan menjadi 6,49%. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara sebesar 7,41% dan 6,83. Tahun 2022 sebesar 6,86%.

4.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian secara fisikal, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah , pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Pembangunan ekonomi (*economical development is growth plus change*), yaitu pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi, seperti usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pendapatan. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara

TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2016	3,55
2017	6,80
2018	5,36
2019	6,89
2020	-1,09
2021	3,98
2022	5,34

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 3,55% dan 6,80%. Kemudian turun pada tahun 2018 sebesar 5,36%. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,89% dan -1,09%. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98% dan 5,34%.

4.2.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia. Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, inflasi memiliki pengaruh penting dalam mengukur kemajuan bidang ekonomi suatu wilayah.

Inflasi erat kaitannya dengan fenomena interaksi antar *demand* dan *supply*, namun kenyataannya tidak lepas dari faktor-faktor lain seperti kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa, perilaku konsumen dan adanya kebijakan pemerintah. Data inflasi di Kalimantan utara adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Tingkat Inflasi di Kalimantan Utara

TAHUN	INFLASI (%)
2016	4,31
2017	0,23
2018	0,41
2019	2,94
2020	0,82
2021	1,48
2022	4,74

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.2.1 Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

Hasil perhitungan regresi berganda adalah sebagai berikut :

Model Persamaan Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

$$Y_t = B_o + B_{1t}. X_t + B_{2t}. X_t + e_t \text{.....(1)}$$

```
. regress Y x1 x2
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	7
				F(2, 4)	=	6.28
Model	.338685613	2	.169342807	Prob > F	=	0.0584
Residual	.107885815	4	.026971454	R-squared	=	0.7584
				Adj R-squared	=	0.6376
Total	.446571429	6	.074428571	Root MSE	=	.16423

Y	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
x1	-.0823873	.0247338	-3.33	0.029	-.1510594	-.0137152
x2	-.0281673	.0361902	-0.78	0.480	-.1286474	.0723129
_cons	7.33722	.1398285	52.47	0.000	6.948994	7.725446

Sehingga model persamaan regresi berganda sebagai berikut

$Y = 7{,}337 – 0{,}082\ X_1 - 0{,}281\ X_2 + e$

Interpretasi dari persamaan tersebut yaitu :

1. Nilai **7,337** merupakan *intercept* atau perpotongan dari hasil perhitungan antara laju pertumbuhan dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara. Artinya tanpa ada pengaruh dari laju pertumbuhan dan inflasi (*Cateris Paribus*) maka diasumsikan tingkat kemiskinan bertambah sebesar **7,337** %.
2. Nilai (-) **0,082** merupakan *slope* dari X_1 yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Notasi (-) artinya apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% (persen) maka diasumsikan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar **0,082** %.
3. Nilai (-) **0,281** merupakan *slope* dari X_2 yaitu inflasi. Notasi (-) artinya apabila tingkat inflasi meningkat atau naik sebesar 1% (persen) maka diasumsikan tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,281 %.

4.2.2 Pengujian Kelayakan Model

4.2.2.1 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Koefisien korelasi (R) adalah nilai yang menunjukan “kuat atau tidak” hubungan linier antar dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf (r) dimana nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai r yang mendekati -1 atau +1 menunjukan hubungan yang kuat dan linear

atau searah. Nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut.

Nilai koefisien determinasi (R^2) menggambarkan seberapa besar nilai dari variabel terikat Y dapat diterangkan variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan atau mendekati nilai 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.

Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	7
				F(2, 4)	=	6.28
Model	.338685613	2	.169342807	Prob > F	=	0.0584
Residual	.107885815	4	.026971454	R-squared	=	0.7584
				Adj R-squared	=	0.6376
Total	.446571429	6	.074428571	Root MSE	=	.16423

Nilai koefisien korelasi diperoleh dari $\sqrt{0{,}7584}$, sehingga hasilnya diperoleh koefisien korelasi (R) sebesar 0,871 menunjukkan bahwa model persamaan regresi untuk laju pertumbuhan dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0,871 dan diartikan memiliki model hubungan yang “kuat”.

Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan “*Adjusted R Square*” sebesar 0,638 artinya setiap perubahan nilai variabel laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan nilai variabel inflasi dapat mempengaruhi perubahan tingkat kemiskinan sebesar 63,8 %. Sedangkan sisanya (100 % - 63,8 %) yaitu 36,2 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain, artinya masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Uji F

Pengujian hipotesis uji F atau *Fisher Test* pada tingkat kepercayaan 95 % dan tingkat kesalahan α = 0,05, hasilnya adalah sebagai berikut :

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	7
				F(2, 4)	=	6.28
Model	.338685613	2	.169342807	Prob > F	=	0.0584
Residual	.107885815	4	.026971454	R-squared	=	0.7584
				Adj R-squared	=	0.6376
Total	.446571429	6	.074428571	Root MSE	=	.16423

bahwa pada tingkat kepercayaan 95% maka tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi secara bersama-sama **belum** memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara", dapat dilihat pada nilai Sig. yaitu 0,058 > 0,05 (5%).

4.2.3.2 Uji t

Uji t dengan *Level of confident* (LOC) atau tingkat kepercayaan terhadap model dalam penelitian ini adalah 95 % dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil uji t adalah sebagai berikut :

y	Coefficient	Std. err.	t	P>|t|	[95% conf.	interval]
x1	-.0823873	.0247338	-3.33	0.029	-.1510594	-.0137152
x2	-.0281673	.0361902	-0.78	0.480	-.1286474	.0723129
_cons	7.33722	.1398285	52.47	0.000	6.948994	7.725446

a. Koefisien untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Signifikan hasil penelitian dapat dilihat dari nilai Sig yaitu 0,029, karena nilai p>[t] < 0,05 (5%) maka diartikan laju pertumbuhan ekonomi secara

signifikan memberikan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara.

b. Koefisien untuk Inflasi (X_2)

Signifikan hasil penelitian dapat dilihat dari nilai Sig yaitu 0,480, karena nilai p>[t] > 0,05 (5%) maka diartikan artinya variabel inflasi secara signifikan belum memberikan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara.

4.3 Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Utara. Pertumbuhan ekonomi merupakan Suatu proses perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan dalam tabungan, produksi dan modal untuk meningkatkan output tanpa melihat apakah kenaikan output tersebut secara lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan perkataan lain, bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total market value) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara sampai saat ini sebagian besar masih tergantung pada sumberdaya alam yang tidak dapat diperbahurui terutama pada sektor ekspor batu bara berdasarkan data PDRB. Sehingga perlu adanya perencanaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan berwawasan lingkungan atau sumberdaya alam yang tidak merusak lingkungan, sehingga diperlukan-langkah strategis yaitu "transformasi ekonomi dari sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui menjadi pengelolaan sumberdaya yang dapat diperbaharui".

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memberikan perubahan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara. Artinya 17 sektor yang terdapat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara makro dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi. Lapangan kerja juga terpenuhi, tingkat kesejahteraan juga meningkat.

Hasil penelitian ini juga dibantu oleh penelitian sebelumnya yaitu penelitian tentang Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah yang dilakukan oleh Wisnu Adhi Saputra (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Kemudian hasil lainnya produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Inflasi erat kaitannya dengan fenomena interaksi antar *demand* dan *supply*, namun kenyataannya tidak lepas dari faktor-faktor lain seperti kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa, perilaku konsumen dan adanya kebijakan pemerintah. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Inflasi yang berlangsung lama akan melumpuhkan perekonomian, di mana pertumbuhan ekonomi berada dalam kondisi *stagnan*. Jika stagnasi terjadi akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa semakin tinggi inflasi maka tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara juga meningkat. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan teori yang menjelaskan bahwa semakin tinggi inflasi maka kemiskina juga akan meningkat. Artinya pemerintah provinsi Kalimantan Utara sudah berusaha memberikan bantuan-bantuan berupa subsidi dana langsung kepada masyarakat, adanya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan sosial non reguler seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan lain-lain.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia termasuk wilayah Kalimantan Utara. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sulit untuk dikurangi atau dicegah oleh pemerintah. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan seseorang. Sedangkan tingkat kesejahteraan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah dalam menentukan indikator kemiskinan diukur melalui pendapatan per-kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu daerah. Akan tetapi secara mikro sebenarnya pemerintah tidak dapat menghitung tingkat pendapatan riil masyarakat, karena membutuhkan waktu yang lama serta sumber daya manusia (SDM) yang banyak untuk memperoleh data pendapatan riil masyarakat. Pertumbuhan ekonomi serta inflasi merupakan gambaran keberhasilan secara makro yang dilakukan olehe pemerintah, walaupun pertumbuhan ekonomi naik inflasi juga dapat dikendalikan apabila pendapatan masyarakat tidak diperhatikan maka kemiskinan tidak akan mengalami penurunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi mampu memberikan pengaruh perubahan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara.
2. Inflasi mampu memberikan pengaruh perubahan dalam meningkatkan tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Utara

5.2 Saran

Adapun saran penelitian adalah

1. Pemerintah Kalimantan Utara dan pemerintah daerah kabupaten dapat mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah Kalimantan Utara.
2. Setelah investor tertarik maka langkah selanjutnya pemerintah membuat kesepakatan bahwa masyarakat lokal daerah sekitar harus dipekerjakan atau terserap di perusahaan investor tersebut jangan pekerja diluar dari daerah dimana investor tersebut menanamkan modalnya.
3. Pemerintah Kalimantan Utara dan pemerintah daerah kabupaten harus selalu memantau perkembangan perusahaan yang berada di daerahnya apakah benar-benar sudah mensejahterakan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (1999) 'Ekonomi Manajerial: Ekonomi Mikro Terapan Untuk Manajemen Bisnis'.

Arsyad, L. (2015) 'Konsep dasar ekonomika industri', *Jakarta (ID): UT* [Preprint].

Aspian Nur, A. *et al.* (2020) *Perhitungan Manual regresi*. 1st edn. Tanjung Selor: CV. Nas Media Pustaka (1, 1).

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara (2022). Available at: https://kaltara.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/350/persentase-penduduk-miskin-provinsi-kalimantan-utara-maret-2022-adalah-6-77-persen.html (Accessed: 29 March 2023).

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara (2023) *BPS Kaltara*. Available at: https://kaltara.bps.go.id/pressrelease/2023/02/06/407/ekonomi-kalimantan-utara-triwulan-iv-2022---2-64-persen--q-to-q---6-17-persen--y-on-y---5-34-persen--c-to-c-.html (Accessed: 4 June 2023).

Boediono, B. (2004) 'RETHINKING OF MY EXPERIENCE AS A MINISTRY OF FINANCE: STABILIZATION IN A PERIOD OF TRANSITION; INDONESIA 2001–2004', *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 20(4).

Djojohadikusumo, S. (1994) 'Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan'.

ILO: Perbudakan Modern Meningkat Karena Kemiskinan Capai 50 Juta Orang (2022). Available at: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220913075931-92-846974/ilo-perbudakan-modern-meningkat-karena-kemiskinan-capai-50-juta-orang (Accessed: 4 June 2023).

Jhingan, M.L. (2022) *The economics of development and planning*. Vrinda Publications (P) Ltd.

Jonnadi, A., Amar, S. and Aimon, H. (2012) 'Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia', *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).

Kuncoro, M. (2018) *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.

Kuznetsov, Y. (2006) *Diaspora networks and the international migration of skills: How countries can draw on their talent abroad*. World Bank Publications.

Mankiw, N.G. (2020) *Principles of economics*. Cengage Learning.

Nurkse, R. (2009) *Ragnar Nurkse: Trade and Development*. Anthem Press.

Poverty in nations welfare (2023). Available at: https://www.unrisd.org/ (Accessed: 4 June 2023).

Ramdani, M. (2015) 'Determinan kemiskinan di Indonesia tahun 1982-2012', *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), pp. 58–64.

Saputra, W.A. and Mudakir, Y.B. (2011) *Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. PhD Thesis. Universitas Diponegoro.

Sari, N.I. (2018) 'Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 â€"2014', *Economics Development Analysis Journal*, 7(2), pp. 128–136.

Sukirno, S. (2017) *Pengantar bisnis*. Prenada Media.